

TANTANGAN KOMUNITAS MUSLIM DI INGGRIS PASCA GERAKAN *BRITISH EXIT* (*BREXIT*)

¹ Muhammad Rafi Wisnu Pratama, ² Gonda Yumitro, ³ Gautam
Kumar Jha

^{1,2} Program Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Malang

³ Centre for Chinese & Southeast Asian Studies, Jawaharlal Nehru University

¹ rafewisnu57@webmail.umm.ac.id, ² gonda@umm.ac.id,

³ gautamkja@mail.jnu.ac.in

Abstrak

Artikel ini membahas tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Inggris setelah terjadinya gerakan British Exit (Brexit). Implikasi Brexit terhadap komunitas Muslim menjadi hal yang sangat relevan dan penting untuk diteliti. Dalam kajian ini, penulis menganalisis tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Inggris pasca referendum Brexit dalam beberapa aspek utama. Pertama, penulis memeriksa retorika politik yang terkait dengan Brexit dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap Muslim di masyarakat. Kedua, penulis mengevaluasi perubahan dinamika imigrasi Muslim di Inggris dan tantangannya terhadap kondisi komunitas Muslim di Inggris. Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan pada artikel ini, penulis melakukan studi literatur dengan menggunakan Harzing, Google Scholar, Taylor & Francis, dan sumber-sumber jurnal lainnya serta kanal-kanal website yang terpercaya. Metode Analisa data dalam artikel ini menggunakan analisis data kualitatif, dimana analisis model ini berkaitan dengan data yang berbentuk kata atau kalimat yang dihasilkan dari obyek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah obyek penelitian. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Brexit telah memberikan tantangan dan dinamika baru bagi komunitas Muslim di Inggris. Retorika politik yang terkait dengan Brexit telah meningkatkan angka tentang intoleransi dan diskriminasi terhadap Muslim di masyarakat. Selain itu, perubahan kebijakan imigrasi yang terjadi setelah Brexit berdampak negatif terhadap akses dan stigma imigran Muslim.

Kata Kunci: Krisis Pangan, Afghanistan, WFP, Implementasi Organisasi Internasional

JISIERA: THE JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND INTERNATIONAL RELATIONS

VOLUME 7, APRIL, 2024; ISSN: 2528-3472: 1-22

DOI: 10.5281/zenodo.10901995

Abstract

This article discusses the challenges and dynamics faced by the Muslim community in England after the British Exit (Brexit) movement. The implications of Brexit for the Muslim community are very relevant and important to research. In this study, the author analyzes the challenges faced by the Muslim community in England after the Brexit referendum in several main aspects. First, the author examines the political rhetoric associated with Brexit and how it may influence perceptions and attitudes towards Muslims in society. Second, the author evaluates the changing dynamics of Muslim immigration in England and its challenges to the condition of the Muslim community in England. In collecting the data needed for this article, the author conducted a literature study using Harzing, Google Scholar, Taylor & Francis, and other journal sources and trusted website channels. The data analysis method in this article uses qualitative data analysis, where this model analysis is related to data in the form of words or sentences produced from the research object and related to events surrounding a research object. The main findings of this research show that Brexit has presented new challenges and dynamics for the Muslim community in the UK. The political rhetoric associated with Brexit has increased rates of intolerance and discrimination against Muslims in society. In addition, changes in immigration policy that occurred after Brexit had a negative impact on access and stigma for Muslim immigrants.

Keywords: *Brexit, Islamophobia, England, Muslim, Racism.*

Pendahuluan

Pada 23 Juni 2016, terjadi sebuah peristiwa geopolitik yang gaungnya terdengar hampir ke seluruh penjuru dunia. *British Exit* atau yang lebih dikenal sebagai *Brexit* adalah peristiwa tersebut, dimana Inggris menarik diri dari keanggotaannya di dalam Uni Eropa (Poltak Partogi Nainggolan, 2016). Masyarakat Inggris mengambil keputusan bahwa Inggris harus keluar dari Uni Eropa ditunjukkan dengan hasil referendum yang menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat khususnya di Inggris dan Wales menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dengan hasil akhir referendum yaitu 51.9% menginginkan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa (BBC

News, 2023). Ada beberapa faktor kunci yang mengiringi kepergian Inggris dari Uni Eropa. Pertama adalah sikap kritis Inggris terhadap aturan dan perjanjian Uni Eropa yang bersinggungan dengan peraturan domestik Inggris, kedua adalah adanya dinamika politik domestik Inggris yang mendorong dan memperkuat kembali mosi keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan terakhir yang juga cukup penting dan berkaitan erat dengan artikel ini adalah beratnya beban ekonomi dan sosial yang harus ditanggung Inggris sebagai negara Uni Eropa (Saviar, 2017).

Isu sosial merupakan salah satu pendorong terbesar mengapa Inggris memutuskan hubungannya dengan Uni Eropa. Isu imigran adalah isu panas yang sangat diperbincangkan pada saat membahas *Brexit* ini. Publik Inggris beranggapan bahwa gelombang imigran yang masuk ke Inggris sudah melampaui batas yang seharusnya, dan mereka berpikir bahwa penyebab semua ini adalah karena keanggotaan Inggris di Uni Eropa (Hardi Alunaza SD & Virginia Sherin, 2018). Muncul beberapa anggapan bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa merupakan salah satu bentuk xenophobia dan rasisme yang pada saat itu diperkuat juga dengan sentimen *euroceptism* yang digaungkan oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Sehingga muncul ketakutan bahwa dengan adanya *Brexit* ini, lapisan masyarakat Inggris yang mulanya mulai tersusun sebagai masyarakat yang inklusif, perlahan-lahan malah bergeser kepada narasi xenophobia dan rasisme yang kuat (Khalili, 2017).

Sentimen warga Inggris kepada para imigran ini bukan tanpa alasan, mereka beranggapan bahwa datangnya gelombang imigran ke Inggris menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial ekonomi seperti tingginya angka pengangguran dan meningkatnya pengeluaran negara dalam hal pelayanan publik. Hal ini kemudian diperparah dengan sentimen-sentimen yang dikeluarkan oleh kalangan Konservatif Inggris yang mengatakan narasi-narasi serupa yang berbau anti-imigrasi. David Cameron mengatakan *"I believe controlling immigration and bringing it down is of vital importance to the future*

of our country' and pledged to 'reduce net migration to the levels we saw in the 1980s and 1990s'(BBC News, 2011) yang bisa diartikan bahwa mengontrol arus imigrasi merupakan hal penting bagi masa depan Inggris. Kemudian ada ucapan dari Theresa May yang mengatakan bahwa *'After years of mass immigration, we now face the enormous task of building an integrated, cohesive society. Allowing more and more immigration would make that impossible'* (United Kingdom Government, 2012).

Kesamaan antara pidato May dan Cameron adalah keduanya sama-sama menekankan bahwa isu imigrasi merupakan sebuah kerugian bagi Inggris dan harus diluruskan segera. Sehingga terlihat dari sini bahwa isu imigrasi merupakan isu penting yang turut diperbincangkan bersamaan dengan terjadinya *Brexit* pada saat itu. Berbicara mengenai xenophobia dan rasisme di Inggris, tentu saja erat kaitannya juga dengan Islamophobia. Ada banyak sekali definisi mengenai Islamophobia, salah satu yang sering sekali digunakan dalam menjelaskan Islamophobia adalah definisi dari Trust Runnymede yang mengatakan bahwa *"Islamophobia is the shorthand way of referring to dread or hatred of Islam and, therefore, to fear or dislike of all or most Muslims"* (Leonie Jackson, 2018). Islamophobia merupakan sebuah ancaman rasial anti-Muslim yang sangat berbahaya bagi hak asasi manusia, aspek fundamental kewarganegaraan, dan kehidupan sosial antara Muslim dan non-Muslim di seluruh belahan dunia. Di Eropa, khususnya di Inggris sendiri isu Islamophobia semakin berkembang pasca kejadian 9/11 di AS dan Bom London pada Juli 2005 yang mana British National Party (BNP) menjadi salah satu aktor politik domestik yang dominan dalam menyebarkan isu ini ke masyarakat.

Partai kelompok sayap kanan di Inggris ini menggunakan Muslim di sana sebagai obyek perundungan untuk kebutuhan politik mereka. Pasca peristiwa 9/11 yang sangat mengguncang dunia khususnya di Barat, memiliki konsekuensi bagi kehidupan Muslim disana. Amerika Serikat misalkan melancarkan operasi *"War on Terror"* guna memerangi terorisme

yang mengancam mereka. Di Inggris sendiri, ada beberapa pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk kepentingan kelompok mereka. Dalam hal ini adalah BNP, dimana kelompok ini melancarkan serangkaian kampanye yang terkesan islamofobik dengan ujaran-ujaran seperti “*Islam out of Britain*” yang ditujukan untuk membentuk persepsi masyarakat Inggris bahwa Islam dan Muslim adalah ancaman bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat Inggris (Allen, 2011). Komunitas Muslim pasca terjadinya *Brexit*, merasa bahwa tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh mereka semakin sulit. Mereka memiliki ketakutan akan mudarnya rasa toleransi dan kebebasan berpendapat yang selama ini sudah menjadi tradisi di dalam kehidupan sosial Inggris. Apalagi, pasca *Brexit*, terjadi peningkatan ujaran kebencian khususnya yang berbasis agama (Cinar, 2022).

Sebelum melakukan penelusuran lebih jauh mengenai topik ini, perlu untuk diketahui penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang penulis angkat untuk memastikan orisinalitas penelitian ini serta posisinya dalam ranah akademis. Kampanye *Brexit* dari awal dipercaya didasari pada xenophobia dan rasisme. Hal ini dilandasi pada fakta bahwa sejak kampanye Leave memenangi referendum, virulensi xenophobia dan rasisme semakin terbuka pada masyarakat Inggris. Salah satu aspek yang turut mempengaruhi menguatnya xenophobia dan rasisme ini menurut Laleh Khalili adalah kebijakan neoliberalisme Inggris pada saat itu yang mana juga sebagai hasilnya membuat membuat sentimen-sentimen rasial khususnya mengenai imigran karena di anggap mengambil hak-hak warga pribumi Inggris seperti sekolah dan perumahan (Khalili, 2017). Dan pasca *Brexit* pula munculnya rasa ketakutan dari berbagai komunitas agama di Inggris terkait *Brexit* yang berujung pada meningkatnya ujaran kebencian dan intoleransi di Inggris. Ozgur H. Cinar mengatakan dalam jurnalnya bahwa retorika-retorika diskriminatif dan prasangka buruk yang dikeluarkan oleh para politisi ikut meningkatkan kasus kejahatan kebencian berbasis agama. (Cinar, 2022).

Seperti misalkan serangan *van* yang dilakukan pada masjid di London's Finsbury Park pada 19 Juni 2017 yang menewaskan 1 orang, atau serangan verbal kepada kelompok agama lain seperti misalkan data yang menunjukkan bahwa menurut The Community Security Trust, insiden ujaran kebencian berbau anti-semitisme meningkat diatas dari 100 kasus setiap bulannya di Inggris pada tahun 2020. Dua survey yang dilakukan oleh Mathew J. Creighton dan Amaney A. Jamal yang kemudian dijadikan sebagai sebuah jurnal, menjelaskan bahwa sebelum dan sesudah referendum mengenai *Brexit*, ada upaya strategis dan sistematis dari para individu untuk menutupi perilaku intoleransi mereka kepada kaum imigran secara khusus kepada kelompok Muslim. Mereka menemukan bahwa ekspresi intoleransi ini merupakan sebuah konstruksi sosial yang dinamis dimana stigma tergantung pada interpretasi norma sosial yang ditentukan secara kontekstual yang dilegitimasi oleh elit politik dan konteks yang mereka kembangkan dalam hal imigran (Creighton & Jamal, 2020).

Joel Carr, Joanna Clifton-Sprigg, Jonathan James, dan Sunčica Vujić menunjukkan bukti-bukti tentang keterkaitan antara *Brexit* dan meningkatnya angka ujaran kebencian di Inggris. Dan dalam temuannya mereka menemukan bahwa referendum *Brexit* meningkatkan angka ujaran kebencian sekitar 15-25% (Carr et al., 2020). Sehingga kemudian berangkat dari latar belakang ini dan setelah melihat fenomena yang ada, maka penulis ingin mengangkat topik penelitian yang berjudul **“Tantangan dan Dinamika Komunitas Muslim di Inggris Pasca Gerakan *British Exit* (*Brexit*)”**. Dengan rumusan masalah yaitu Apa yang menjadi tantangan dan bagaimana dinamika yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Inggris pasca *Brexit* ?. Berdasarkan studi literatur yang sudah penulis lakukan diatas, tulisan mengenai Tantangan dan Dinamika Komunitas Muslim di Inggris Pasca Gerakan *British Exit* (*Brexit*) ini mencoba akan mencoba mengisi gap penelitian mengenai tantangan dan dinamika komunitas Muslim di Inggris pasca *Brexit*.

Metode Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana analisis model ini berkaitan dengan data yang berbentuk kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian. Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan pada artikel ini, penulis melakukan studi literatur dengan menggunakan berbagai *tools* seperti Harzing, Google Scholar, Taylor & Francis, dan sumber-sumber jurnal lainnya serta kanal-kanal website yang terpercaya. Hal ini dilakukan dengan cara menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data serta sumber yang berupa kepustakaan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Penulis menggunakan kata kunci “Brexit”, “muslim”, “islamophobia”, “Inggris”, “Rasisme”, “imigran” yang dicari dalam bentuk artikel jurnal ataupun sumber kepustakaan lainnya mulai dari rentang waktu 2024 hingga 2024. Dalam proses inklusi dan eksklusi data, penulis memilih jurnal yang memuat data dan penjelasan mengenai tema yang diangkat yaitu tantangan komunitas Muslim di Inggris pasca adanya referendum Brexit. Oleh sebab itu, dari ratusan artikel yang ada, penulis menggunakan 51 artikel kepustakaan yang sudah dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan penulisan artikel jurnal ini.

Hasil dan Diskusi

Gerakan *British Exit* (BREXIT) Inggris Dari Uni Eropa

Hasil referendum pada 23 Juni 2016 yang menunjukkan bahwa Inggris pada akhirnya keluar dari keanggotaannya di Uni Eropa menimbulkan kegamangan bagi sejumlah pihak, khususnya komunitas Muslim di Inggris.

Kondisi Muslim di Eropa dan khususnya di Inggris sendiri memang cukup mengkhawatirkan. Ujaran-ujaran kebencian dan perilaku islamofobik kerap kali terlihat dari masyarakat Barat kepada Muslim apalagi pasca kejadian 9/11 di Amerika Serikat pada 2001 (Awan & Zempi, 2016). Sedangkan di Inggris sendiri, kejadian Bom London pada bulan Juli 2005 dan yang terbaru adalah serangan teroris di Manchester dan London pada 2017 membuat sentimen terhadap kelompok Muslim di sana semakin panas yang pada akhirnya mengarah pada insiden-insiden dan ujaran kebencian kepada Muslim di Inggris. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya gerakan *Brexit* yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya di latar belakang bahwa membawa serta bersamanya isu-isu sosial sensitif termasuk mengenai keberadaan kelompok Muslim di Inggris. Kampanye *Brexit* dirasa mempromosikan atmosfer dimana wajar bahwa masyarakat untuk berlaku rasis, islamofobik, dan xenofobik (Awan & Zempi, 2020).

Referendum *Brexit* menjadi katalis bagi peningkatan kasus ujaran kebencian di Inggris. Menurut *Home Office* (Departemen Dalam Negeri), makna dari kejahatan kebencian adalah setiap kejahatan yang dimotivasi oleh permusuhan atas dasar ras, agama, orientasi seksual, disabilitas, atau identitas transgender (Home Office, 2016). Tercatat pada 3 bulan pertama pasca referendum, Inggris dan Wales mencatat angka tertinggi dalam kejahatan berbasis kebencian. Lebih dari 14.000 kasus dilaporkan dalam rentang waktu Juli sampai September 2016 (BBC News, 2017). Kemudian data dari Departemen Dalam Negeri Inggris memperlihatkan pada April 2016 hingga Maret 2020 terdapat 24.317 insiden yang berhubungan dengan kejahatan kebencian berbasis agama (Home Office, 2023), sebuah peningkatan yang cukup signifikan berkaitan dengan kasus ini.

Kelompok minoritas di Inggris mayoritas menginginkan agar Inggris tetap berada dalam Uni Eropa, hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa mendorong adanya inklusivitas di Inggris. Hal ini ditunjukkan pada voting yang mengatakan

bahwa lebih dari dua pertiga dari pemilih keturunan Asia, tiga perempat pemilih keturunan kulit hitam, dan 70% pemilih Muslim menyatakan Inggris sebaiknya tetap berada dalam dekapan Uni Eropa (Khalili, 2017). *Brexit* pada sebagian besar narasinya berputar pada isu-isu pluralism pada sosial-budaya, nasionalisme, dan imigrasi. Aspek-aspek inilah yang pada akhirnya berhubungan dan bersinggungan langsung dengan referendum yang mana dinilai membuat kelompok masyarakat di Inggris terpolarisasi secara masif (Ashcroft & Bevir, 2016). Kondisi kelompok Muslim di Inggris memang cukup termarginalkan. Hal ini bisa kita lihat pada kenyataan bahwa laporan dari *Office for National Statistics (ONS)* mengatakan bahwa dari semua kelompok minoritas, Muslim memiliki kesempatan kerja paling rendah pada hal manajerial.

Bahkan dengan umur dan kualifikasi yang sama, lelaki Muslim lebih rendah 76% kesempatannya dalam mendapatkan pekerjaan dibandingkan penduduk kulit putih (Mahamdallie, 2015). Dan karena adanya *Brexit* yang juga oleh banyak kalangan ditandai sebagai salah satu kebangkitan gerakan sayap kanan di Barat yang mempromosikan ideologi supremasi, identitas, dan pergerakan ini membuat kelompok Muslim semakin rentan terhadap serangan-serangan kebencian baik secara fisik maupun verbal. Adanya dikotomi yang mengatakan bahwa nilai-nilai Islam tidak sesuai dengan liberalisme Barat seperti bagaimana Barat menggambarkan bahwa Islam mengajarkan kekerasan dan ketidaksetaraan gender membuat serangan kepada kelompok Muslim semakin kentara khususnya pada saat *Brexit*. Pada bagian selanjutnya penulis akan menjelaskan dua alasan utama mengenai tantangan dan dinamika masyarakat Muslim di Inggris pasca referendum *Brexit*.

Peningkatan Retorika Negatif Aktor Politik Inggris Terhadap Muslim

Peranan politisi dalam membangun narasi publik sangat besar dalam sebuah proses perjalanan politik. Tidak terkecuali juga pada saat referendum Brexit ini. Para politisi Inggris khususnya kalangan konservatif turut bertanggung jawab atas meledaknya isu-isu rasisme dan ujaran-ujaran kebencian khususnya kepada Muslim. The UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination mengatakan bahwa banyak politisi dan tokoh politik terkemuka Inggris gagal dalam menangkal prasangka-prasangka kebencian sehingga memberanikan individu untuk melakukan tindakan intimidatif dan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang berbeda suku, ras, dan agama (Abdelkader, 2017). Kampanye The Vote Leave yang dikemukakan oleh kelompok Konservatif yang digawangi oleh Boris Johnson banyak membawa isu-isu sensitif seperti imigrasi dimana kelompok ini mengatakan bahwa masalah muncul ketika Uni Eropa memberlakukan kebijakan-kebijakan pro imigran yang kemudian diikuti oleh Inggris, dan mereka merasa solusi dari masalah ini adalah menahan gelombang imigran yang ingin masuk ke Inggris (Allen, 2021).

Disinilah muncul adanya dikotomi identitas antara “kami” yang merujuk kepada pribumi Inggris asli, dan “mereka” yang merujuk pada kaum pendatang (Prentoulis et al., 2017). Munculnya dikotomi semacam ini tentu saja tidak berdampak baik bagi para kelompok minoritas khususnya Muslim. Dimana pihak pihak seperti partai kelompok sayap kanan di Inggris menggunakan Muslim di sana sebagai obyek perundungan untuk kebutuhan politik mereka. Contoh ujaran kebencian salah satunya sempat diutarakan oleh Boris Johnson yang mana pada saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Luar Negeri Inggris, dimana ia mengatakan bahwa “*Muslim women wearing burkas "look like letter boxes"*” (BBC News, 2018) atau ia menyamakan seorang wanita muslim yang menggunakan Burqa terlihat sama dengan kotak surat dan ucapan Boris Johnson ini menjadi salah satu bukti bahwa bagaimana politisi sayap kanan Inggris menggunakan kebencian atas Islam untuk mencapai ambisi politiknya.

Kemudian, ada pula pernyataan yang dikemukakan oleh Nigel Farage, seorang politisi Inggris yang dikenal sebagai sosok yang sangat xenofobik dan salah satu pendukung gagasan *euroseptism* di Inggris. Ia bersama dengan Boris Johnson mengatakan bahwa hari referendum dilaksanakan adalah “hari kemerdekaan” bagi Inggris yaitu dia mengatakan “*dawn is breaking on an independent United Kingdom*” (BBC News, 2016). Kalimat ini merupakan sebuah metafora dimana dimaksudkan bahwa hari kemerdekaan disini adalah kebangkitan kembali masyarakat Inggris dari “belenggu” aturan-aturan imigrasi yang memberatkan Inggris dari Uni Eropa (Van Houtum & Bueno Lacy, 2017). Narasi-narasi berbau kebencian terhadap komunitas minoritas atau dalam hal ini komunitas Muslim terus saja terdengar dari para politisi Inggris. Theresa May, pada 2016 misalnya, menginginkan Inggris untuk keluar dari *The European Convention on Human Rights and the European Court of Justice* karena May menganggap konvensi ini merupakan ancaman bagi keamanan domestik Inggris karena mencegahnya untuk mendeportasi teroris. Namun, frasa “teroris” disini secara halus disamarkan oleh May untuk secara tidak langsung membesar-besarkan “ancaman” yang bisa saja datang dari para imigran Muslim (Asthana Anushka, 2016).

Dan tentu saja, salah satu peristiwa yang cukup menarik perhatian pada saat itu adalah poster dari *UK Independence Party (UKIP)* yang bertulisan “Breaking Point” dengan latar belakang foto para imigran yang berkulit gelap. Poster ini seolah mempromosikan rasa kecemasan khususnya mengenai gelombang migran yang memasuki Inggris dan terkhusus kepada para pencari suaka yang berasal dari negara-negara Muslim (Creighton & Jamal, 2020). Isu Muslim dan imigran menjadi bahan bakar yang sempurna bagi para politisi populis-nasionalis yang kerap membenturkan isu ini dengan isu-isu “*English nationalism*” pada masyarakat Inggris (Brown, 2017). Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa adanya terjadi perasaan cemas di antara masyarakat asli Inggris dan komunitas Muslim, karena konvergensi anti-migran xenophobia dan Islamophobia ini menjadi salah satu topik panas dalam perpolitikan Inggris dan menjadi alat politik khususnya bagi

kelompok Konservatif dalam meraup suara kaum-kaum nasionalis dan kelompok garis kanan lainnya.

Sebagai contoh misalkan adalah UKIP yang salah satu tokohnya adalah Nigel Farage, walaupun pada pemilu 2015 ia dan partainya mengalami kekalahan, tetapi narasi-narasi rasis dan xenofobiknya mampu menentukan diskursus pada isu sosial khususnya pada kelompok muslim (Khalili, 2017). Tell Mama, sebuah organisasi yang memonitoring insiden-insiden anti Muslim di Inggris mengatakan bahwa pada 2015, dari 207 akun daring di media sosial yang melakukan serangan terhadap komunitas Muslim, 63 diantaranya mengikuti Nigel Farage yang notabene merupakan salah satu pemimpin sayap kanan terkemuka di Inggris. Dan hal ini kemudian diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap Muslim meningkat hingga 300% dalam tahun yang sama karena pandangan dan narasi yang dikeluarkan oleh kelompok Konservatif sayap kanan Inggris khususnya dalam menghadapi referendum Brexit (Mark Townsend, 2016).

Komunitas Muslim tentu saja dirugikan dengan serangkaian narasi yang dikemukakan oleh para politisi ini, kelompok Muslim menjadi sasaran empuk untuk dijadikan kambing hitam atas kegagalan kebijakan-kebijakan pemerintahan Inggris (Khalili, 2017) karena kelompok ini memang sudah digambarkan sebagai kelompok yang berseberangan dengan nilai-nilai Inggris dan Kristen yang melekat pada masyarakat Inggris. Apalagi pasca *Brexit* ini dimana sentimen anti imigran kerap kali berjalan beriringan dengan ujaran-ujaran kebencian yang sayangnya juga dikobarkan oleh para politisi Inggris. Klaim ini diperkuat dengan data dari YouGov dimana pada 2016, 77% orang di Inggris menginginkan adanya larangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah Inggris. Kemudian pada Februari 2016, 56% orang percaya bahwa nilai-nilai fundamental Islam dan Inggris tidak bisa disatukan (Antonio Perra, 2019). Data-data tersebut menjadi tolok ukur bagaimana narasi dan retorika negatif yang dikeluarkan oleh para politisi ini memiliki pengaruh dalam intoleransi dan diskriminasi terhadap masyarakat Muslim

di Inggris pasca Brexit dan menjadi salah satu tantangan dan bahaya yang mengintai masyarakat Muslim di Inggris.

Tantangan Muslim Dalam Kebijakan Imigrasi Inggris

Tantangan komunitas Muslim di Inggris pasca *Brexit* tidak hanya berkuat pada retorika politisnya saja, namun juga berkembang kepada hasil dari apa yang para politisi tersebut diskusikan selama menjabat yaitu kebijakan-kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan imigrasi yang memang menjadi salah satu diskursus utama dalam membicarakan *Brexit*. Jika ditarik kebelakang, kebijakan imigrasi Inggris mulai terbuka pasca Perang Dunia 2, kondisi ekonomi Inggris yang jatuh akibat perang dan kurangnya sumber daya manusia mendorong pemerintah Inggris mengeluarkan “*The British Nationality Act*” pada 1948 yang mana ini mengizinkan para pekerja khususnya dari negara persemakmuran seperti India, Bangladesh, dan lainnya masuk ke Inggris dan tanpa harus menggunakan visa (Donmez & Sutton, 2020). Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan populasi non kulit putih akibat kebijakan ini mendorong terjadinya peningkatan tensi rasial di Inggris.

Pada 1961, poling menunjukkan bahwa 73% publik Inggris lebih condong untuk mengontrol arus imigrasi khususnya bagi imigran yang non-kulit putih (Robbie Shilliam et al., 2018). Kebijakan imigrasi Inggris terus berubah khususnya di medio 1960-1970an, sentimen imigran yang sudah kadang negatif pada masyarakat Inggris mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti *The Commonwealth Immigrants Act 1962* dan *The Immigration Act 1971* yang pada intinya meregulasi ulang aliran imigran yang masuk ke Inggris khususnya dari negara-negara Persemakmuran. Namun. Masuknya Inggris ke *European Economic Community* atau yang sekarang disebut sebagai Uni Eropa pada 1973 membuat kebijakan imigrasi Inggris menjadi lebih terbuka. Pembahasan mengenai imigrasi pada perkembangan selanjutnya terus memenuhi ruang publik dan ruang politik

Inggris. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak Konservatif selalu mencoba memainkan isu ini karena hal ini bagus untuk kepentingan elektoral mereka. Terlihat mulai dari 2007, kubu Konservatif semakin gencar dalam memainkan retorika imigrasi pada komunikasi politik mereka (Partos & Bale, 2015). Pada 2013 misalkan, Kementerian Dalam Negeri Inggris menyatakan akan menggelar kampanye “Operasi Vaken”, operasi ini merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan imigrasi “*hostile environment*” yang dikemukakan oleh pemerintah Inggris saat itu.

Kebijakan ini awalnya ditujukan untuk menekan para imigran gelap yang ada di Inggris namun malah berubah seiring berjalannya waktu yaitu mengarah kepada diskriminasi terhadap kaum-kaum minoritas khususnya Islam (L. Holloway, 2018). Operasi Vaken yang tadi sempat disebutkan di awal menjadi salah satu contohnya dimana ada slogan-slogan yang berbau rasisme kepada para imigran seperti “*go home or face arrest*” dan lainnya (Hannah Jones et al., 2018). Pihak Konservatif menggunakan cara semacam ini untuk mengatur diskursus politik mereka mengenai imigrasi agar dibenturkan dengan sentimen anti Islam dan anti imigran. Dan ketika pada akhirnya mereka memenangkan pemilu 2015, mereka pada akhirnya yang membawa Inggris keluar dari Uni Eropa dengan imigrasi menjadi salah satu isu utama yang diangkat. Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Office for National Statistics (ONS), menunjukkan bahwa sebenarnya angka imigrasi di Inggris cenderung fluktuatif, Dimana pada Juni 2012 jumlah imigran yang masuk sebanyak 639.000, kemudian pada bulan yang sama di 2015 naik menjadi 778.000, dan sempat mencapai puncaknya pada Juni 2016 dimana sebanyak 832.000 imigran memasuki Inggris.

Namun pasca Brexit, di Juni 2017, angka imigran secara umum yang masuk ke Inggris turun drastis di angka 718.000 (Office for National Statistics, 2023). Data dan angka ini kemudian jika coba kita untuk elaborasikan dengan imigran Muslim maka hal ini bukan tanpa alasan sebenarnya. Pada periode 2004 hingga 2011, jumlah imigran yang masuk ke

Inggris berjumlah 540.000 dan pasca terjadinya referendum *Brexit*, angka ini berkurang menjadi 101.000 saja pada 2017 (Byrne et al., 2020). Dibawah pemerintahan Theresa May, Inggris mengeluarkan *The Immigration Act 2016* dimana peraturan ini dikeluarkan untuk memperketat akses masuk para imigran yang sebelumnya sangat mudah di Inggris. Peraturan ini sangat berdampak kepada kalangan minoritas di Inggris termasuk Muslim. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat memiliki keleluasaan dalam memeriksa status imigrasi setiap orang sehingga beresiko dalam praktik-praktik diskriminatif terselubung kepada suatu kelompok namun didasari atas adanya peraturan ini (Byrne et al., 2020). Kebijakan semacam ini pada akhirnya membentuk konsepsi di masyarakat khususnya kepada kelompok Muslim bahwa mereka adalah ancaman bagi masyarakat Inggris.

Riset dari Hope not Hate menunjukkan bahwa 54% masyarakat Inggris merasa bahwa Islam secara umum adalah ancaman bagi Inggris, kemudian 31% percaya bahwa proses migrasi Muslim ke Inggris merupakan bagian dari rencana besar untuk “mengislamisasi” Inggris (Fear, 2018). Keberadaan kelompok Muslim di Inggris kemudian pada prosesnya digambarkan oleh para politisi Inggris sebagai biang keladi atas isu-isu ekstrimisme dan terorisme yang terjadi di Inggris. Sehingga hal ini kemudian mempersulit kelompok Muslim untuk bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sekitarnya. Keresahan muncul dalam kelompok Muslim, pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa ditakutkan akan menghalangi ratusan ribu pengungsi Muslim dari negara-negara konflik untuk bisa menyelamatkan diri ke Inggris (Muslim Association of Britain, 2016).

Keberadaan Muslim di Inggris pasca *Brexit* khususnya dalam diskursus politik hampir selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif. Misalkan saja pada saat pemilihan Walikota London pada 2016, calon dari kubu Konservatif yaitu Zac Goldsmith, yang mana ia mencoba menggaet suara dari para pemilih dengan menggunakan narasi-narasi xenofobik dan rasis khususnya kepada Islam. Apalagi lawannya saat itu yaitu Sadiq Khan

merupakan seorang berketurunan Pakistan (Robert Mackey, 2016). Sentimen imigran yang dibalut dengan ujaran rasis dan xenofobik semacam ini tentu saja menjadi ancaman dan tantangan yang cukup mengkhawatirkan bagi kelompok Muslim di Inggris. Dan kelompok Muslim pasca referendum Brexit ini merasakan labelisasi dan stigmatisasi dari masyarakat Inggris secara umum karena isu imigran yang berhubungan erat dengan kejadian ujaran kebencian dan hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan terkait ujaran kebencian terhadap ras dan agama 15-25% di Inggris (Joanna Clifton-Sprigg et al., 2021).

Kesimpulan

Kehidupan kelompok muslim di Inggris pasca *Brexit* bisa dikatakan cukup sulit. Sebelum adanya kejadian ini pun Muslim sudah banyak mengalami diskriminasi dan ujaran-ujaran kebencian apalagi pasca kejadian 9/11 dan Bom London pada 2005. *Brexit* merupakan hasil dari akumulasi kekuatan sayap kanan yang pada masa itu menguat di Barat. Peristiwa ini merefleksikan bagaimana tumbuhnya sebuah normalisasi pada saat adanya rasisme secara sosial dan kultural kepada kelompok Muslim yang kerap kali disamakan sebagai kelompok imigran. Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa ini membawa bersamanya sentimen anti-muslim yang dibalut dengan embel-embel anti imigran yang didasari atas nasionalisme dan populisme semu. Tulisan ini berusaha mengkaji apa saja tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Inggris pasca *Brexit* dan penulis menemukan dua tantangan utama yaitu retorika politisi dan kebijakan imigrasi di Inggris yang semakin menekan komunitas Muslim di Inggris.

Pertama, retorika politisi ini memainkan peranan krusial dalam membentuk persepsi dan citra komunitas Muslim. Dalam konteks *Brexit*, beberapa politisi menggunakan retorika yang memperkuat stereotipe negatif terhadap imigran Muslim, yang dapat memperburuk diskriminasi dan Islamophobia. Kedua mengenai kebijakan imigrasi di Inggris dimana

pasca *Brexit* penulis menemukan adanya kebijakan yang pada dasarnya baik untuk menekan angka imigran gelap masuk ke Inggris namun disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjadikannya sebuah alat untuk melakukan diskriminasi kepada kelompok minoritas khususnya kelompok Muslim. Dalam menyongsong masa depan pasca-*Brexit*, penting bagi Inggris untuk membangun sistem sosial yang memperkuat keragaman, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan kesetaraan bagi semua warganya, termasuk komunitas Muslim. Dengan adanya kerjasama dan rasa toleransi yang tinggi maka bisa mewujudkan kondisi masyarakat yang inklusif dan humanis di Inggris pasca *Brexit*.

Daftar Pustaka

- Abdelkader, E. (2017). A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands, and Sweden. *UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law*, 16. <https://doi.org/10.5070/n4161038735>.
- Allen, C. (2011). Opposing Islamification or promoting Islamophobia? Understanding the English Defence League. *Patterns of Prejudice*, 45(4), 279–294. <https://doi.org/10.1080/0031322X.2011.585014>
- Allen, C. (2021). A Hate Crime Crisis? Investigating the Function of Brexit, Terrorism, Covid-19, and Black Lives Matter on Levels of Hate Crimes in Today's United Kingdom. *Przegląd Policyjny*, 142(2), 61–72. <https://bibliotekanauki.pl/articles/1798563.pdf>.
- Antonio Perra. (2019, June 7). *Brexit And The Politics Of Islamophobia*. Globalsecurityreview.Com. <https://globalsecurityreview.com/brexit-politics-islamophobia/>

- Ashcroft, R., & Bevir, M. (2016). Pluralism, National Identity and Citizenship: Britain after Brexit. *The Political Quarterly*, 87(3), 355–359. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-923x.12293>.
- Asthana Anushka. (2016, April 25). *UK must leave European convention on human rights, says Theresa May*. The Guardian.Com. <https://www.theguardian.com/politics/2016/apr/25/uk-must-leave-european-convention-on-human-rights-theresa-may-eu-referendum>
- Awan, I., & Zempi, I. (2016). The Affinity between Online and Offline anti-Muslim Hate Crime: Dynamics and Impacts. *Aggression and Violent Behaviour*, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.02.001>
- Awan, I., & Zempi, I. (2020). ‘You all look the same’: Non-Muslim men who suffer Islamophobic hate crime in the post-Brexit era. *European Journal of Criminology*, 17(5), 585–602. <https://doi.org/10.1177/1477370818812735>
- BBC News. (2011, April 14). *In full: David Cameron immigration speech*. <https://www.bbc.com/news/uk-politics-13083781>
- BBC News. (2016, July 1). *EU referendum: Farage declares “independence day.”* <https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-eu-referendum-36613295>.
- BBC News. (2017, February 15). *Record hate crimes’ after EU referendum*. <https://www.bbc.com/news/uk-38976087>.
- BBC News. (2018, August 6). *Boris Johnson faces criticism over burka “letter box” jibe*. BBC News.
- BBC News. (2023, July 4). *EU Referendum Results*. https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results

- Brown, H. (2017). Post-Brexit Britain: Thinking about 'English Nationalism' as a factor in the EU referendum. *International Politics Reviews*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.1057/s41312-017-0023-7>
- Byrne, B., Alexander, C. (Professor of S., Khan, O., Nazroo, J. Y., & Shankley, W. (2020). *Ethnicity, race and inequality in the UK: state of the nation*. Policy Press.
- Carr, J., Clifton-Sprigg, J., James, J., & Vujić, S. (2020). *Love Thy Neighbour? Brexit and Hate Crime*. www.mwpweb.eu/JonathanJames/
- Cinar, O. H. (2022). Brexit and its Implications on the Freedom of Religion and Belief in the UK. *International Journal of Religion*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.33182/ijor.v3i1.1941>.
- Creighton, M. J., & Jamal, A. A. (2020). An overstated welcome: Brexit and intentionally masked anti-immigrant sentiment in the UK. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1791692>.
- Donmez, P. E., & Sutton, A. (2020). British immigration policy, depoliticisation and Brexit. *Comparative European Politics*, 18(4), 659–688. <https://doi.org/10.1057/s41295-020-00204-7>
- Fear, R. C. (2018). *Understanding the drivers of hope and hate fear, hope & Loss*. <http://charity.hopenothate.org.uk>.
- Hannah Jones, Yasmin Gunaratnam, Gargi Bhattacharya, William Davies, Sukhwant Dhaliwal, Emma Jackson, & Roiyah Saltus. (2018). *Go home? The politics of immigration controversies*. Manchester University Press.
- Hardi Alunaza SD, & Virginia Sherin. (2018). Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 156–170.

- Home Office. (2016). *Action Against Hate. The UK Government's plan for tackling hate crime*. www.gov.uk/government/publications
- Home Office. (2023, November 2). *Statistics on hate crimes and racist incidents in England and Wales recorded by the police*. UK Government.
- Joanna Clifton-Sprigg, Suncica Vujic, & Joel Carr. (2021, February 25). *Did the vote for Brexit lead to a rise in hate crime?* Economic Observatory.
- Khalili, L. (2017). After Brexit: Reckoning With Britain's Racism And Xenophobia. *Poem*, 5(2-3), 253-265. <https://doi.org/10.1080/20519842.2017.1292758>
- L. Holloway. (2018, April 23). *Race matters: intending not to discriminate is not enough*. Runnymedetrust.Org. <https://www.runnymedetrust.org/blog/intending-not-to-discriminate-isnt-enough>
- Leonie Jackson. (2018). *Representing Muslims: Islamophobic discourse and the construction of identities in Britain since 2001*. <https://core.ac.uk/download/pdf/196185614.pdf>
- Mahamdallie, H. (2015). Islamophobia: the othering of Europe's Muslims. *International Socialism Journal Issue*, 1-10. <http://isj.org.uk/islamophobia-the-othering-of-europes-muslims/>
- Mark Townsend. (2016, July 2). UK 'hotspots' targeted in bid to calm post-Brexit tension. The Guardian.
- Muslim Association of Britain. (2016). *What Next?*
- Office for National Statistics. (2023, November 23). *Long-term international migration, provisional: year ending June 2023*. Office for National Statistics: Census 2021.

- Partos, R., & Bale, T. (2015). Immigration and asylum policy under Cameron's Conservatives. *British Politics*, 10(2), 169–184. <https://doi.org/10.1057/bp.2015.20>
- Poltak Partogi Nainggolan. (2016, June 2). “Brexit”, Penyebab dan Implikasi Globalnya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 5–8.
- Prentoulis, M., Naidoo, R., Dorling, D., Ghadiali, A., Piacentini, T., Corbett, R., O’callaghan, C., Gilmartin, M., Jamali, R., & Dearden, N. (2017). After Brexit. *Soundings*, 64(64), 41–82. <https://journals.lwbooks.co.uk/soundings/vol-2016-issue-64/article-7521/>.
- Robbie Shilliam, Matthew Watson, & David Coates. (2018). *Race and the Undeserving Poor: From abolition to Brexit*. Agenda Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctv5cg8m6>
- Robert Mackey. (2016, May 3). *In Race for London Mayor, Trump’s Anti-Muslim Playbook Seems to Be Failing Zac Goldsmith*. Theintercept.Com. <https://theintercept.com/2016/05/03/least-london-rich-heirs-campaign-instill-fear-muslims-not-going-well/>
- Saviar, Y. M. (2017). Mengapa Brexit? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 258–271. <https://repository.unair.ac.id/67835/1/Fis.HI.39.17%20.%20Sav.m%20-%20JURNAL.pdf>.
- United Kingdom Government. (2012, December 12). *An Immigration System That Works in the National Interest*. Gov.Uk. <https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-speech-on-an-immigration-system-that-works-in-the-national-interest>

Van Houtum, H., & Bueno Lacy, R. (2017). Reflections: Extreme geographies the political extreme as the new normal: The cases of brexit, the French state of emergency and Dutch islamophobia. *Fennia*, 195(1), 85–101. <https://doi.org/10.11143/fennia.64568>